



Dr. H. Suhardi Duka, MM  
Gubernur Sulawesi Barat

Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga  
Wakil Gubernur Sulawesi Barat



## ALUR RUANG LAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT



SUNUSI, S.Pd., M.M.  
P.T., Kepala Badan Kesbangpol Sulbar

HASIL YANG KELUAR (TTE)

ALUR DISPOSISI

KEPALA BADAN

KEMBALI KE PIMPINAN

SEKRETARIS BADAN

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

PERSYARATAN

1. FASILITAS KELEMBAGAAN PARPOL

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

PERSYARATAN

1. RENCANA AKSI DAN PELAPORAN HASIL KEGIATAN  
2. REKOMENDASI PENELITIAN

BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN  
KEBANGSAAN & KARAKTER BANGSA

PERSYARATAN

1. PENDAFTARAN PASIKIBRAKA

BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA,  
KEMASYARAKATAN & EKONOMI

PERSYARATAN

1. PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

WAKTU PELAYANAN INFORMASI PADA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAPAT DILAKUKAN PADA SETIAP HARI  
PADA JAM KERJA SBB :

SENIN S/D KAMIS  
08.00 S/D 16.00 WITA

JUM'AT  
08.00 S/D 15.30 WITA

BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

DALAM PENYEDIAAN INFORMASI KEPADA  
MASYARAKAT / ORGANISASI / LEMBAGA /  
INSTANSI ATAU PERUSAHAAN SEMUANYA  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS).

### A. SYARAT PENGUJIAN PERMOHONAN INFORMASI

#### I. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENANGGARAN DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERBUT ADMINISTRASI: PENGALIAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

- SK TENTANG SUSUNAN DARI PERSONALIA PARPOL PROV. SULBAR YANG DILEGALISIR
- FOTO COPY SURAT KETERANGAN, NPWP
- SURAT KETERANGAN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN KURSI PARPOL DI DPRD PROV. SULBAR YANG DILEGALISIR OLEH SEKRETARIS  
KPU PROVINSI
- SURAT KETERANGAN DARI BANK YANG MENYATAKAN MEMILIKI NOMOR REKENING BANK ATAS NAMA DPD PARPOL
- RENCANA PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARPOL
- SURAT PERNYATAAN PARPOL YANG MENYATAKAN BERSEDIA DITUNTUT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG BERLAKU, APABILA MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR.

#### II. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

BADAN ALUR TUGAS KESBANGPOL, PENANGANAN AKSI UNJUK RASA BERASASAKAN PERUB SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022

- PEMBERITAHUAN RENCANA UNJUK RASA
- KODINGRASI PENANGANAN SUBSTANSI TUNTUTAN
- PENYERAPAN INFORMASI RENCANA AKSI
- PENYERAPAN PERKAWAN PENUNJUK RASA
- PENANTIAN DAN PELAPORAN

#### III. BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

PENBENTUKAN PASKIBRAKA BERASASAKAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN (IDEOLOGI) PANCASILA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2022 PASAL 6 AYAT 1 TENTANG PEMBENTUKAN PASKIBRAKA DILAKSANAKAN MELALUI TAHAPAN  
SEBAGAI BERIKUT :

- REKRUTMEN DAN SELEKSI
- PENYUSUNAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- PENGUKUHAN PASKIBRAKA
- WARGA NEGARA INDONESIA
- CALON PASKIBRAKA MERUPAKAN PELAJAR SLTA (SMA/SMK) DENGAN MINIMAL 6 (ENAM ORANGE) TAHUN SAMPAI DENGAN 19  
(DELAPAN BELAS) TAHUN PADA TANGGAL AGUSTUS TAHUN PELAKSANAAN.
- MEMPEROLEH IZIN TERTULIS DARI KEPALA SEKOLAH
- MEMPEROLEH PERSetujuan TERTULIS DARI ORANG TUA / WALI
- MENGISI DAN MENANGKANTING SURAT PERNYATAAN KESIDAKN MEMATUHI PERATURAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS  
PASKIBRAKA TAHUN PELAKSANAAN
- NILAI AKADEMIK MINIMAL BERKATEGORI BAIK
- SEHAT JASMAN DAN ROHANI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN SEHAT DARI FASILITAS KESEHATAN SETEMPAT
- MEMILIKI TINGGI BADAN DAN BEAT BADAN IDEAL (PUTRA 170 CM - 180 CM DAN PUTRI 165 CM - 175 CM)
- MEMILIKI BENTUK KAKI 4 (4 BOWLE) DENGAN EKSTREMITAS PALING BANYAK 5 SENTIMETER, BENTUK KAKI X (X BEND) EKSTREMITAS  
PALING BANYAK 5 SENTIMETER, DAN TIDAK MEMILIKI BENTUK KAKI BATAK (FLAT FOOT)

#### IV. BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, EKONOMI, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

MEKANISME ALUR PENDAFTARAN ORMAS UU NO.16 THN 2017 PERMENDAGRI NO.57 THN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN  
SISTEM INFORMASI ORMAS PERMENDAGRI NO. 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORMAS

- SURAT PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORMAS KEPADA GUBERNUR SULAWESI BARAT, CO. BADAN KESBANGPOL PROV. SULBAR.
- PENGSAHAN BADAN HUKUM DARI KEMENKUMHAM RI
- AKTA PENGHIAN YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS
- AD ATAU AD ART ORMAS.
- PROGAM KERJA.
- SUSUNAN PENGURUS DAN SK TENTANG STRUKTUR PIMPINAN WILAYAH.
- SURAT KETERANGAN ASAL/ASLI SEKRETARIAT ORMAS DARI LURAH / CAMAT.
- NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAS NAMA ORMAS.
- SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA KEPENGURUSAN ATAU TIDAK DALAM PERKARA DI PENGADILAN. (DI ATAS MATERI) 10.000
- SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAPORKAN KEGIATAN (DI ATAS MATERI) 10.000
- K. BIDARA PENGURUS ORMAS, YAITU KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA ATAU SEBUTAN LAINNYA.
- MEMILIKI KEBERSIHAN KANTOR ATAU SEKRETARIAT ORMAS DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN, ATAU SURAT PERJANJIAN KONTRAK ATAU IZIN  
PAKAI DARI PENILIK.
- FOTO COPY KARTU TANDA PENUNJUK ELEKTRONIK PENGURUS ORMAS (KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA).
- FOTO KANTOR ATAU SEKRETARIAT ORMAS, DENGAN YANG MEMUT PAPAN NAMA.
- FOTO 4 X 6 (KETUA, SEKRETARIS, DAN BENDAHARA) PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT.
- FORMAT SURAT PERNYATAAN ORMAS
- LINK PENDAFTARAN SKK :

[https://docs.google.com/forms/d/1FAgQL6C1m8H1K26-RH3ZmG0g4Jmnpn7AuL6ERuAd9vQ/viewfrom?usp=stf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/1FAgQL6C1m8H1K26-RH3ZmG0g4Jmnpn7AuL6ERuAd9vQ/viewfrom?usp=stf_link)

📍 Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat

📱 Kesbangpol Sulbar

🌐 Kesbangpol.Sulbar.go.id